

**EFEKTIVITAS PENGATURAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK) BAGI SUB-KONTRAKTOR PENYEDIA USAHA
JASA KONSTRUKSI**

(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FAISHAL HARIS

NIM. 115010101111004



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

EFEKTIVITAS PENGATURAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUIK) BAGI SUB-KONTRAKTOR PENYEDIA USAHA JASA KONSTRUKSI

**Faishal Haris, Imam Ismanu, S.H., M.S., Amelia Srikusumadewi, S.H.,
M.Kn.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: srimaharajafh@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pengaturan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi. Tema skripsi ini dipilih seiring dengan berkembangnya bidang usaha jasa konstruksi menjadi salah satu penopang pembangunan nasional. Kepemilikan IUIK merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi bagi setiap badan usaha jasa konstruksi. IUIK bagi setiap badan usaha jasa konstruksi merupakan syarat bagi badan usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Sub-kontraktor termasuk ke dalam penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi. Penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUIK. Terdapat badan usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki IUIK namun telah melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi sebagai sub-konstruksi. IUIK digunakan untuk dapat menentukan kontraktor yang tepat dalam pekerjaan konstruksi dengan melihat klasifikasi dan kualifikasi yang terdapat di dalam IUIK. IUIK dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten Gresik dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan penerbita IUIK. Hambatan dalam efektivitas kepemilikan IUIK adalah kurang mendapat perhatian dan mengandalkan hasil kerja konstruksi. Upaya sosialisasi dan *monitoring* terus digalakkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Kata kunci: Jasa konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK)

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of ownership arrangements Construction Services Business License (called IJUK) for sub-contracting construction services provider. The theme of this thesis have been in line with the development of the field of construction services into one pillar of national development. IJUK ownership is a matter that must be met for any business enterprise construction services. IJUK for any business enterprise construction services is a prerequisite for business entities to carry out construction work construction services. Sub-contractors included in the provider and implementer construction services business. Providers and implementing construction services shall have IJUK. There is a construction services business entities that do not have IJUK yet been carrying out construction work as a sub-construction. IJUK used to be able to determine the right contractor in construction work by looking at the classification and qualifications contained in IJUK. IJUK issued by local governments. Gresik issued by the Regional Government to appoint the Public Works Department to implement penerbita Gresik IJUK. Barriers in effectiveness IJUK ownership is less attention and rely on the work of construction. Dissemination and monitoring efforts continue to be encouraged Public Works Department Gresik.

Keywords: Construction Services, Company of Construction Services, Construction Services Business License (IJUK)

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya atau pemekaran perbaikan dari sektor ekonomi dan penyempurnaan baik dalam segi pelaksanaan maupun administrasi. Salah satu sektor pendukung pembangunan nasional adalah jasa konstruksi. Menurut **Richard Burton Simatupang** membedakan bidang usaha ke dalam 3 (tiga) macam¹ :

1. Bisnis dalam bidang kegiatan Perdagangan (*commerce*)
2. Bisnis dalam bidang kegiatan industri (*industry*)
3. Bisnis dalam bidang kegiatan jasa (*service*)

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, berkembang pula badan usaha (perusahaan) yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD, yang selanjutnya disebut dengan KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun resmi tentang apakah perusahaan itu². Menurut pasal 1 huruf a “Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan” :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Setiap perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam pendirian perusahaan. Adanya kekhususan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memenuhi perizinan di bidang jasa konstruksi, yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut dengan IUJK). IUJK berfungsi sebagai surat izin bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi bidang jasa konstruksi guna dapat melangsungkan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan perusahaan terkait dan dengan IUJK menjadi sebuah syarat bagi badan usaha jasa konstruksi untuk dapat melakukan pekerjaan jasa

¹ Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007., hlm 2.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 67.

konstruksi. IUJK merupakan syarat wajib bagi badan usaha jasa konstruksi namun terdapat badan usaha jasa konstruksi yang menjadi sub-kontraktor proyek jasa konstruksi tidak memiliki IUJK dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.

Latar belakang penelitian yang diuraikan diatas yang menjadi alasan bagi peneliti melakukan penelitian di bidang jasa konstruksi terkait dengan IUJK yang mana *notabene* merupakan surat izin pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi namun pemenuhannya masih belum sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak efektifnya pengaturan kepemilikan IUJK bagi badan usaha jasa konstruksi yang sebagaimana telah diatur di dalam peraturan yang kemudian dibahas oleh peneliti

B. MASALAH/ISU HUKUM

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengaturan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi?
2. Apa hambatan dalam pengaturan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi?
3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan pengaturan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi?

C. PEMBAHASAN

Guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer diperoleh penulis dengan wawancara kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik melalui Kepala UPT. Jasa Konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, melalui General Manager Unit Bisnis dan Konstruksi, dan Sub-Kontraktor, CV. Harapan Jaya, Gresik melalui bagian pemasaran. Data primer juga diperoleh melalui wawancara terhadap populasi

badan usaha jasa konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Gresik dengan sample badan usaha jasa konstruksi yang memiliki sub-kontraktor. Data primer tersebut kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh penulis dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data-data tersebut yang kemudian yang digunakan sebagai acuan analisis terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1. Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUIK) Bagi Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Berbicara tentang usaha jasa konstruksi adalah sebuah keistimewaan tersendiri dimana badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi memiliki kekhususan tersendiri dalam pendiriannya secara legalitas suatu perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi, suatu perusahaan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK). IUIK merupakan syarat untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Pengaturan mengenai kewajiban kepemilikan IUIK telah diatur dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Nomor : 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Efektivitas peraturan perundang-undangan didukung dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. Efektivitas suatu peraturan menurut **Lawrence Meir Friedman**, dalam sistem hukum ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni³ :

- a) Subtansi hukum, sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
- b) Struktur atau pranata hukum, sistem structural yang yang menentukan hukum itu bisa atau tidaknya dilaksanakan dengan baik. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menentukan struktur hukum adalah kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan, namun apabila tidak ditegakkan oleh struktur (aparat) penegak hukum maka hukum itu tidak akan berfungsi.

³ Satjipto Rahardjo, *op. cit.* Lihat juga Scribd, **Teori Sistem Hukum Friedman** (online), www.scribd.com, diakses pada 17 Desember 2014.

- c) Budaya hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Menurut **Breidemer** dalam bukunya yang berjudul *Law As An Integrative Machanisme*, yang merupakan pokok kerangka yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yaitu⁴ :

- a) *Adaptation* (proses ekonomi)
- b) *Goal pursuance* (proses politik)
- c) *Pattern maintenance* (dapat diartikan sebagai proses sosialisasi dalam kebudayaan)
- d) *Integration* (proses hukum)

A. Faktor Substansi Terkait Dengan Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Unsur substansi hukum merupakan unsur yang mana efektifnya suatu peraturan dapat dilihat dari peraturan itu sendiri. Menurut **Satjipto Rahardjo** mengungkapkan mengenai hukum bahwa, “Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat”⁵. Unsur substansi merupakan suatu produk undang-undang atau peraturan lainnya. Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum, dan undang-undang dalam arti formil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum⁶. Berarti undang-undang adalah hukum⁷.

Secara substansial, pengaturan mengenai kewajiban bagi penyedia usaha jasa konstruksi untuk memiliki IUK telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

⁴ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1979, hlm 126.

⁵ Satjipto Rahardjo, *op. cit.* hlm 189.

⁶ L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm 92.

⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 80.

2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Perundang-undangan telah mengatur jelas mengenai pelaksana dan/atau penyedia usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Sub-kontraktor merupakan penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi maka dari itu wajib pula memiliki IUJK. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, faktor substansi juga dipengaruhi oleh kontrak kerja pekerjaan jasa konstruksi. Kontrak perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

B. Faktor Struktur Terkait Dengan Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau yang dikenal dengan sistem hukum *common law*. Pada sistem hukum ini merupakan sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis, yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya⁸. Faktor struktur yang merupakan unsur bagi penegakan hukum yang berguna agar hukum dapat berlaku secara efektif. Penegak hukum menegakkan hukum yang secara fungsional tidak berfungsi dengan baik dengan tidak berlakunya hukum yang mengatur tentang IUJK bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi. Faktor struktur adalah para penegak yang menjalankan apa yang tercantum di dalam faktor substansi, produk hukum. Penegak hukum adalah subjek hukum yang mempraktekan hukum yang abstrak menjadi sebuah kenyataan⁹.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pembantuan dari apa yang dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam

⁸ Lutfi Effendi, **Pengantar Sosiologi Hukum** (handout), Malang, 2013, hlm 22.

⁹ Luthfi Effendi, **Pengantar Sosiologi Hukum**, modul tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

mengeluarkan IUJK bagi penyedia usaha jasa konstruksi. Tugas mengeluarkan IUJK oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ini sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2012. Atas dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gresik nomor 30 Tahun 2012 tersebutlah yang memberikan tugas dan wewenang bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk dapat melaksanakan pemberian IUJK bagi perusahaan jasa konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik selain memiliki kewajiban melakukan pembinaan dibidang jasa konstruksi, juga melakukan pengawasan dibidang jasa konstruks. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan monitoring kepada badan usaha jasa konstruksi¹⁰. Bagian Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang melaksanakan pengawasan jasa konstruksi sebagaimana pada penjelasan pasal 6 ayat (4) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi” .

Fungsi pembinaan dan pengawasan memiliki keterkaitan hubungan yang cukup erat kaitannya guna menunjang efektivitas hukum bidang jasa konstruksi. Dengan pengawasan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum guna dapat memperbaiki permasalahan hukum yang terdapat di dalam bidang jasa konstruksi.

C. Faktor *Culture* (Budaya Masyarakat atau Kebudayaan) Terkait Dengan Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Manusia merupakan pusat dari pembuatan hukum dengan hukum yang dibuat oleh, dari, dan untuk manusia itu sendiri. Bergerak secara dinamis, manusia sejatinya ingin menumbuhkan sebuah keharmonisan dalam berkehidupan sesuai dengan apa yang ingin dicapai melalui hukum. Menurut **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya *Ilmu Hukum*¹¹ menerangkan bahwa :

“Dalam membicarakan anatomi ketertiban, bahwa hukum itu merupakan salah satu saja dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, Kepala UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Pada tanggal 2 Desember 2014.

¹¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, *op. cit*, hlm 23.

menciptakan ketertiban. Dengan demikian maka ketertiban itu merupakan konfigurasi dari berbagai lembaga seperti hukum dan tradisi”.

Faktor substansi (produk hukum), faktor struktur (penegak hukum), dan faktor kebudayaan (*culture*). faktor substansi erat kaitannya dengan faktor struktur yang mana dari faktor substansi yang merupakan produk hukum kemudian diaplikasikan oleh penegak hukum menjadi kenyataan. Begitu juga dengan faktor kebudayaan, yang mana dalam hal ini masyarakat juga turut serta berperan dalam menunjang kemampuan pengembangan usaha dibidang jasa konstruksi.

Ketentuan mengenai masyarakat jasa konstruksi tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi termasuk ke dalam forum dan lembaga serta pengguna/pelaksana/pengawas/perencana jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan setiap pekerjaan utama jasa konstruksi, badan usaha jasa utama dapat melimpahkan sebagian pekerjaan jasa konstruksinya ke pihak lain yang mana dalam hal ini disebut dengan sub-kontraktor. Sub-kontraktor berperan sebagai penyedia usaha jasa konstruksi yang melaksanakan sebagian dari pekerjaan utama dan menjadi bagian kecil pekerjaan utama jasa konstruksi. Pelimpahan pekerjaan jasa konstruksi dalam dunia usaha jasa konstruksi merupakan suatu hal yang dapat dipastikan terjadi dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi utama ada yang tidak memiliki keahlian dan/keterampilan dari kualifikasi dan klasifikasi jasa konstruksi terhadap bagian yang terdapat dalam Order Kerja (OK) dari *owner* (pengguna jasa konstruksi), sehingga dilimpahkan kepada sub-kontraktor yang memiliki keahlian dan/keterampilan sesuai dengan klasifikasin dan kualifikasi Order Kerja (OK). Alasan kedua kenapa diadakan pelimpahan pekerjaan jasa konstruksi? hal itu dikarenakan adanya sub-kontraktor yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang ada pada Order Kerja (OK) dengan harga yang lebih rendah dan dengan kualitas yang baik¹².. Pemilihan sub-kontraktor yang akan melaksanakan

¹² Hasil wawancara dengan Ananta, karyawan bagian Unit Bisnis dan Konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Pada tanggal 10 Januari 2015.

sebagian dari pekerjaan utama jasa konstruksi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang berbeda, yakni¹³ :

- a. Pelelangan umum
- b. Pelelangan terbatas (disebut dengan tender)
- c. Pemilihan langsung
- d. Penunjukkan langsung

Konteks faktor kebudayaan juga tercermin dalam perilaku masyarakat jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan usaha jasa konstruksi. Kebudayaan tampak pada kontrak kerja yang terjadi diantara penyedia utama usaha jasa konstruksi, yakni PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, dengan sub-kontraktor usaha jasa konstruksi, yakni CV. Harapan Jaya, Gresik. Dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, memilih CV. Harapan Jaya, Gresik, sebagai sub-kontraktor dengan cara Penunjukkan Langsung. Penunjukkan langsung diambil karena sub-kontraktor tersebut telah menjadi rekanan lama PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, sejak tahun 2010. Kerjasama kedua badan usaha jasa konstruksi tersebut dimulai pada tahun 2010 dengan bentuk kerjasama pekerjaan jasa konstruksi sebagai berikut :

Table 1.

Proyek Kerjasama PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, Dengan Sub-Kontraktor CV. Harapan Jaya, Gresik

No.	Tahun Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konstruksi
1.	2011 - 2013	Gudang curah 50.000 Ton dan conveyor
2.	2013	Conveyor
3.	2013 - 2014	Gudang bahan baku dan conveyor

Sumber: Hasil wawancara dengan Ananta, Staf Unit Bisnis dan Konstruksi PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Diolah 2015.

Sesuai kebiasaan atau kebudayaan masyarakat jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, dalam melakukan penunjukkan

¹³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

langsung sub-kontraktornya. PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, mengacu pada hasil kerja yang telah dilakukan oleh sub-kontraktor yang akan ditunjuk dan berdasarkan penawaran harga dan Order Kerja (OK)¹⁴. Secara garis besar proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sama halnya seperti menerima pekerja dalam bidang yang lainnya. Gari besar penandatanganan dan pelaksanaan kontrak yang terjadi sekalipun dalam dunia usaha jasa konstruks sebagai berikut¹⁵ :

- a. Penunjukan penyedia barang/jasa
- b. Penandatanganan kontrak
- c. Pengendalian pekerjaan
- d. Serah terima hasil pekerjaan
- e. Pelaporan dan penyerahan barang/jasa kepada pengguna akhir

Kebiasaan yang ada di masyarakat jasa konstruksi, yakni penyedia dan pelaksana jasa konstruksi yang ada di wilayah Gresik mencatat sebanyak 162 badan usaha jasa konstruksi telah mencatatkan perusahaannya telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)¹⁶. Terdapat 21 perusahaan berjenis Perseroan Terbatas (PT) yang berada di wilayah Kabupaten Gresik yang tercatat telah memiliki IUJK¹⁷. Setiap badan usaha jasa konstruksi yang berjenis Perseroan Terbatas (PT) memiliki sub-kontraktor, dengan 6 (enam) diantaranya memiliki sub-kontraktor yang tidak memiliki IUJK¹⁸.

Ketiga faktor efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya namun akan mempengaruhi satu faktor dengan dua faktor yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi (mempengaruhi), interdependensi (ketergantungan), dan interelasi (berhubungan). Faktor budaya yang mana diketahui bahwa faktor budaya merupakan kebiasaan atau kebudayaan (*culture*) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ananta, staf Unit Bisnis dan Konstruksi PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Pada tanggal 15 Desember 2015.

¹⁵ Samsul Ramli, *op. cit*, hlm 16.

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Pekerjaan Umum, Daftar BUJK Yang Sudah BerIUJK Konversi Bulan Januari-Desember 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, 2014.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan perusahaan terkait. Pada tanggal 9 Maret 2015.

2. Hambatan dan Upaya Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat jasa konstruksi. Menurut **Soerjono Soekanto**, "Maka akan terjadi pula ketertinggalan perubahan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum"¹⁹. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dibenahi apabila diperlukan untuk dapat mengefektifkan hukum yang berlaku dengan baik. Sebelum melakukan suatu perubahan ada baiknya untuk meninjau sejauh mana hukum tidak berlaku secara efektif dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kultur masyarakat yang menyebabkan hukum tidak berlaku secara efektif.

A. Hambatan dan Upaya Dalam Faktor Substansi Terkait Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Menurut **Soerjono Soekanto**, "Hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman mengikuti pergerakan masyarakat yang bersifat dinamis"²⁰, peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi mengalami perubahan yang sebelumnya mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dibuatnya peraturan perundang-undangan dengan tujuan keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum²¹.

Bagi sub-kontraktor yang mana usaha jasa konstruksinya berskala kecil dan menengah juga diwajibkan untuk memiliki IUIK sebagai izin usahanya. Sub-kontraktor juga wajib memiliki IUIK karena sub-kontraktor merupakan penyedia dan pelaksana konstruksi, meskipun lahan pekerjaan jasa konstruksi tidak didapatkan dari pengadaan jasa dari Pemerintah. Berdasarkan sampel penelitian menyebutkan bahwa, menganggap bahwa bentuk usaha yang dijalankan adalah badan usaha kecil, karena lingkup usaha jasa konstruksi yang dijalankan sebatas jasa konstruksi berskala kecil, dan jenis badan usahanya adalah Badan Usaha

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1981, hlm 31.

²⁰ *Ibid*, hlm 30.

²¹ Satjipto Rahardjo, *op. cit*, hlm 20.

Milik Swasta (BUMS)²². Sekalipun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan badan usaha yang berskala kecil juga harus mentaati dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengatur tentang jasa konstruksi beserta keajiban perizinan usaha di bidang jasa konstruksi.

Adanya ketidaksinkronan dari apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang mengatur tentang bentuk usaha dari badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, ketidaksinkronan aturan yang ada yang kemudian membuat kebingungan dalam masyarakat jasa konstruksi. Ketidaksinkronan yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak diaturnya mengenai kewajiban kepemilikan IUJK bagi sub-kontraktor atau sub-penyedia terkait dengan bentuk usahanya, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Adanya hambatan efektivitas yang dipaparkan di atas, langkah nyata yang telah dilakukan oleh UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan izin usaha di bidang jasa konstruksi²³. Sosialisasi merupakan langkah preventif yang dilakukan agar penyedia usaha jasa konstruksi tertib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh penyedia usaha jasa konstruksi yang ada diwilayah Kabupaten Gresik²⁴.

B. Hambatan dan Upaya Dalam Faktor Struktur Terkait Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Dikeluarkannya produk hukum tersebut memunculkan kemungkinan bagi penyedia usaha jasa konstruksi tidak mengetahui perkembangan/perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang IUJK²⁵. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik melakukan langkah nyata dengan mensosialisasikannya kepada

²² Hasil wawancara dengan CV. Harapan Jaya, Gresik, sebagai pihak sub-kontraktor. Pada tanggal 15 Januari 2015.

²³ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, Kepala UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Pada tanggal 2 Desember 2015.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, Kepala UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Pada tanggal 15 Januari 2015

penyedia usaha jasa konstruksi, baik penyedia usaha jasa konstruksi besar hingga penyedia usaha jasa konstruksi kecil, terkait dengan disahkannya perbaruan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur mengenai IUJK²⁶.

Kelemahan dalam sosialisasi tersebut adalah subjek yang disosialisasi mengenai produk hukum tersebut hanya perusahaan jasa konstruksi besar yang selama telah dilakukan oleh pihak dinas, perusahaan jasa konstruksi kecil masih banyak yang belum mengetahuinya²⁷. Kelemahan sosialisasi tersebut dibuktikan dengan masih adanya perusahaan kecil jasa konstruksi yang masih belum memiliki IUJK sebagaimana diwajibkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Hambatan lain yang menghambat efektivitas berlakunya pengaturan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi adalah perbedaan lahan proyek yang dilaksanakan oleh setiap badan usaha jasa konstruksi

Badan usaha jasa konstruksi yang mana diketahui tidak memiliki IUJK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik akan melakukan *monitoring* terhadap badan usaha jasa konstruksi tersebut²⁸. Tindakan preventif dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang melakukan sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan jasa konstruksi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi termasuk IUJK sebagai syarat dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, ditambahkan juga pernyataan yang disampaikan oleh Martiyus, staf UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

²⁸ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, Kepala UPT. Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Pada tanggal 15 Januari 2015.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Faktor *Culture* (Budaya Masyarakat atau Kebudayaan) Terkait Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

Kebiasaan masyarakat jasa konstruksi yang melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi berdasar pada hukum kebiasaan menjadi hambatan yang terlihat dalam penelitian ini. Kebiasaan-kebiasaan itu terjadi pada cara pemilihan sub-kontraktor jasa konstruksi. Pemilihan yang dilakukan oleh PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, yang memilih CV. Harapan Jaya, Gresik, adalah dengan cara penunjukan langsung. Penunjukan langsung memang diatur di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penunjukan langsung yang dilakukan berdasarkan pada hasil kerja dan kemampuan untuk memberikan harga yang rendah dengan kualitas yang baik merupakan alasan utama dipilihnya sub-kontraktor, CV. Harapan Jaya, Gresik²⁹. Selain kedua alasan tersebut, penunjukan langsung dilakukan karena telah berlangsungnya kerjasama sejak tahun 2010. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam faktor kebudayaan atau masyarakat jasa konstruksi³⁰.

Berdasar pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat jasa konstruksi tersebut, terdapat suatu pola guna mengupayakan agar hambatan-hambatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ketentuan dalam pemilihan sub-kontraktor agar kualitas pekerjaan konstruksi tetap dalam kondisi baik³¹. Pemilihan sub-kontraktor yang tepat akan menjamin hasilkerja yang berkualitas dan juga meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata masyarakat pengguna jasa konstruksi

²⁹ Hasil wawancara dengan Yus Isdianto, General Manager Unit Bisnis dan Konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Pada tanggal 10 Januari 2015.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ananta, staf Unit Bisnis dan Konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Pada tanggal 15 Januari 2015.

³¹ Hasil wawancara dengan Yus Isdianto, General Manager Unit Bisnis dan Konstruksi, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik. Pada tanggal 10 Januari 2015.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan pada penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan efektivitas pengaturan kepemilikan IUJK bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi, masih terdapat penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki IUJK dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Penyedia dan pelaksana yang tidak memiliki IUJK dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi bertindak sebagai sub-Kontraktor. Kontraktor utama dalam memilih sub-kontraktor berdasarkan pada hasil kerja yang telah dikerjakan oleh sub-kontraktor.
- b. Hambatan dalam efektivitas pengaturan kepemilikan IUJK bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi terbagi ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, yakni :

1) Faktor substansi

Adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang mengatur jelas mengenai kepemilikan IUJK bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi. Hal ini menyebabkan para sub-kontraktor tidak begitu memperhatikan akan pentingnya IUJK dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.

2) Faktor struktur

UPT.Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik kurang menjalankan sosialisasi dengan baik dan menyeluruh.Sosialisasi hanya dilakukan kepada badan usaha jasa konstruksi besar.Baik badan usaha jasa konstruksi besar maupun kecil

tetaplah pada dasarnya penyedia/pelaksana/perencana jasa konstruksi yang wajib memiliki IUJK. Fungsi *monitoring* berdasarkan pada laporan badan usaha jasa konstruksi kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

3) Faktor *culture* (kebudayaan/budaya masyarakat)

Dalam melakukan kerjasama bisnis dengan subpenyedia, Kontraktor utama jasa konstruksi lebih mengutamakan pada hasil kerja yang telah dilakukan oleh sub-kontraktor terkait. Syarat yang selanjutnya adalah telah dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Upaya dalam mengatasi hambatan yang ada

1) Faktor substansi

Pembaharuan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman yang juga mempengaruhi kebutuhan manusia di bidang jasa konstruksi. Pembaharuan dilakukan baik di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

2) Faktor struktur

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik melalui UPT. Jasa Konstruksi melaksanakan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan dengan setelah dilakukannya *monitoring* perusahaan yang telah tercatat ke dalam Dinas Pekerjaan Umum dengan dimilikinya IUJK.

3) Faktor *culture* (kebudayaan/budaya masyarakat)

Evaluasi dilakukan oleh setiap kontraktor utama yang memiliki sub-kontraktor. Berdasarkan pada evaluasi tersebut, kontraktor utama dapat mengambil keputusan mengenai kerjasama antara kontraktor utama dengan sub-kontraktor pada pekerjaan jasa konstruksi yang selanjutnya.

2. Saran

Saran ini ditujukan sebagai rekomendasi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik, dan Sub-Kontraktor, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

a) Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Sebagai salah satu faktor struktur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menjadi pengawas sekaligus penyusun peraturan perundang-undangan daerah bagi Kabupaten Gresik, instansi Pemerintahan daerah inilah yang menjadi salah satu pemangku tanggung jawab dalam bidang usaha jasa konstruksi. Adanya hambatan yang terjadi di lapangan berdasarkan temuan penelitian, yakni badan usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki IUJK namun telah melaksanakan usaha jasa konstruksi. Hal ini memberikan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan UPT. Jasa Konstruksi harus lebih gencar lagi melakukan pengawasan yang berupa *monitoring* dan sosialisasi. Bukan sebagai hal yang remeh apabila IUJK tidak diwajibkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), bagaimanapun juga Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di bidang jasa konstruksi adalah penyedia dan pelaksana jasa konstruksi. Oleh karena itu, wajib hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memenuhi perizinan di bidang jasa konstruksi, yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebagai pengawas berwenang untuk mempertegas peraturan perundang-undangan kepada pelaksana perturan perundang-undangan, yakni penyedia usaha jasa konstruksi, termasuk sub-kontraktor.

b) Bagi kontraktor utama

Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dapatlah dilakukan dengan cara melimpahkan sebagian dari pekerjaan jasa konstruksi ke penyedia usaha jasa konstruksi lainnya, yang disebut dengan sub-kontraktor. Pelimpahan yang dilakukan dalam mengerjakan konstruksi disarankan untuk lebih memperhatikan klasifikasi dan kualifikasi sub-kontraktor yang tercantum di dalam IUJK. Dengan IUJK itulah maka suatu perusahaan jasa konstruksi dapat melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi

c) Sub-kontraktor dalam dunia jasa konstruksi termasuk ke dalam penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi. Dengan ketentuan tersebut, maka disarankan bagi pengusaha jasa konstruksi baik badan usaha jasa konstruksi yang berskala besar sampai dengan yang berskala kecil disarankan untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan memiliki IUJK sebagai syarat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Lutfi Effendi, **Pengantar Sosiologi Hukum** (handout), Malang, 2013.
- Luthfi Effendi, **Pengantar Sosisologi Hukum**, modul tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Samsul Ramli, **Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**, Visimedia, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo , **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1979
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**,Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 80.
- Soerjono Soekanto, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1981.

Internet

- Scribd, **Teori Sistem Hukum Friedman** (online), www.scribd.com, diakses pada 17 Desember 2014.